

# URGENSI PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PILIHAN PRESIDEN 2024 YANG DEMOKRATIS

**Retno Mawarini Sukmariningsih, S.H., M.H.,<sup>1</sup>, Mashari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
Email: retno\_mawarini@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
Email: mmashary@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/4jqr6d29>

## **Abstract**

*This research aims to describe identity politics which is often misunderstood as part of practical politics which is national politics. The problem in this research is the tendency for political participation to give preference to one of the political contestations based on personal identity in the form of ethnicity or religion. The research method used in this study is a qualitative approach. The results of this research show that identity politics is related to ethnicity or ethnic identity, religion, ideology and local interests which are generally represented by political elites. Identity politics based on primordial ties will easily replace citizenship politics, and national insight will be pushed aside. Identity politics has the potential to destroy the democratic principles that have become the government system adopted by Indonesia considering the pluralism of its society. The practice of identity politics will be one of the important things for Indonesia ahead of the 2024 elections, considering that identity politics is closely related to equal rights, unity and integrity of society, as well as democratic principles.*

**Keywords: Identity Politics; Voter Behavior; Presidential Choice, Democracy**



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan politik identitas seringkali disalahartikan sebagai bagian dari politik praktis yang merupakan politik kebangsaan. Permasalahan dalam penelitian ini adanya kecenderungan partisipasi politik dalam memberikan pilihannya kepada salah satu kontestasi politik berdasarkan identitas personal berupa etnis maupun agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas terkait dengan etnisitas atau identitas etnis, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik. Politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak. Politik identitas berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengingat pluralisme masyarakatnya. Praktik politik identitas akan menjadi salah satu hal yang penting bagi Indonesia menjelang pemilu 2024 mendatang, mengingat politik identitas berhubungan erat dengan kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi.

*Kata kunci: Politik Identitas; Perilaku Pemilih; Pilihan Presiden, Demokrasi*

## **Latar Belakang Masalah**

Indonesia suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras serta budaya. Penduduk memiliki beragam budaya, agama serta suku yang berbeda-beda, kerap kali bangsa ini di hadapkan pada satu kondisi persatuan berada diujung tanduk. Persatuan Indonesia sering menghadapi ancaman eksternal maupun internal, yang tak dapat dilepaskan dari perjalanan politik identitas yang berkaitan dengan kajian terkait

masalah etnis, agama, ideologi, dan kepentingan lokal elit politik untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu.<sup>1</sup>

Politik identitas terjadi karena pengaruh dasar parsial maupun secara interaksial, sehingga terbentuknya identitas etnis dan agama yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Politik identitas timbul karena adanya keinginan untuk diakui dan diperlakukan setara atau adil, kemauan untuk menjaga nilai budaya dari masing-masing kelompok, dan karena rasa kesetiaan kepada etnisnya.<sup>2</sup>

Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kemunculannya disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka bangkit menunjukkan identitas etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya.<sup>3</sup>

Politik identitas terkait adanya kontestasi pada pemilihan presiden yang kembali mengulang rivalitas antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada tahun 2019 ini kedua pasangan calon menggunakan politik identitas sebagai suatu cara untuk mendapatkan suara dari para pemilih, diawali dengan adanya Ijtima Ulama dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto, adanya isu-isu yang sering diberitakan yakni isu PKI, antek asing, isu tenaga kerja asing terutama dari China, dan kriminalisasi ulama.<sup>4</sup> Kondisi faktual penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan

---

<sup>1</sup> Lestari, Y. S., 2018, *Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama*. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19 - 30. Retrieved from <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>

<sup>2</sup> Ubed Abdillah, 2002, *Politik Identitas Etnis*, IndonesiaTera, Magelang, hlm. 4.

<sup>3</sup> Sri Astuti Buchari, 2014, *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

<sup>4</sup> Fatiyah Wardah, "Hasil Ijtima' Ulama II pastikan dukungan bagi Prabowo-Sandiaga" (<https://www.voaindonesia.com>), diakses pada tanggal 2 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

isu yang selalu diberitakan tersebut membuat pihak Joko Widodo merespon dengan cara menggandeng Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden.

Perkembangan politik identitas sebagai politik yang gagal hanya didepankan pada para elite tertentu. Perilaku politik identitas tak hanya dari contoh kasus tersebut, tetapi kasus yang terjadi dalam pelaksanaan politik identitas di benua Asia bahwa politik identitas yang terjadi dilakukan oleh negara Malaysia yang berdekatan langsung dengan negara Indonesia. Kegiatan politik identitas dengan adanya suku Tionghoa dan India yang memiliki kesempatan untuk membangun partai Malaysian Indian Congres yang bertujuan mengambil keuntungan etnis ini dapat berdiri kokoh di negara Malaysia. Negara Nepal terjadi isu politik identitas karena faktor minoritas yang tidak mampu menyuarakan suaranya, bila dilihat tidak adanya bantuan dukungan minoritas yang membuat masyarakat, yaitu tergolong anak muda mengancam kehidupan dirinya sendiri.

Politik identitas dipahami sebagai suatu tindakan politis yang mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota atau kelompok yang memiliki kesamaan latar belakang yang berbasis ras, agama etnis atau gender. Kondisi masyarakat Indonesia yang memang memiliki ragam etnis dan budaya yang sangat kental, maka Presiden Joko Widodo ingatkan para kontestan pemilu 2024 agar menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas. “Kita harus mengingatkan para kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi, bukan kampanye gontok-gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa,”<sup>5</sup>

Para kontestean pemilu harus memulai kampanye yang mengurangi mobilisasi massa dan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan

---

<sup>5</sup> Presiden Joko Widodo dalam rekaman audio visual di Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lemhannas Republik Indonesia, Tanggal 9 Agustus 2022.

dapat melahirkan kampanye yang berintegritas yang menolak penggunaan Politik Sara dan Politik Identitas, yang lebih mengedepankan politik ide dan gagasan, karena yang ingin kita bangun bukan demokrasi pengkultusan, bukan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan.

Andi Widjajanto,<sup>6</sup> bahwa ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, aturan hukum, dan budaya politik yang berpengaruh dengan politik identitas, karena variabel pertamanya adalah konsensus dan kohesi politik. Keempat variabel ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bangsa Indonesia menuju pemilu 2024.

Komitmen persatuan dari seluruh pihak, soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi. Dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan, serta kampanye kontestasi pemilu. Seain itu juga dampak politik identitas, dapat menjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif mencakup masalah murni tentang pengalaman orang atau objek yang ada di lingkungan penelitian.<sup>7</sup> Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>6</sup> Andi Widjajanto, Gubernur Lemhannas RI,

<sup>7</sup> Emzir, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 174

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

David William dalam Lexy Moeleong,<sup>8</sup> bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik tertarik secara alamiah. Penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa ada perspektif yang dapat diungkapkan. Fokusnya ada pada fenomenal dan pada perasaan atau persepsi dari partisipan studi.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru dengan penjabaran secara rinci dan objektif berdasar data yang didapatkan dari wawancara langsung dan pengumpulan data sekunder yang didapat dari objek. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi politik identitas.

## **Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden 2014**

Politik identitas sebuah alat politik suatu kelompok, ras, etnis, suku, negara, budaya, agama, atau yang lain untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politik identitas dalam didasarkan pada kesamaan identitas suatu kelompok ditengah masyarakat yang plural. Praktik politik identitas juga tak jarang menjadi sumber konflik ditengah masyarakat yang merasa kelompoknya superior melawan kelompok inferior ataupun kelompok mayoritas melawan kelompok minoritas.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moeloeng, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, hlm. 4-5.

<sup>9</sup> Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

Politik identitas dianut oleh warga negara yang berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas sendiri lahir dari sebuah kelompok sosial yang seakan merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Konsekuensi lahirnya bentuk-bentuk kekerasan dan konflik komunal yang terjadi di beberapa daerah karena memanfaatkan agama serta etnis sebagai faktor utama untuk memobilisasi suara massa pemilih. Konsekuensi dari adanya gerakan ini membuat terhambatnya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.<sup>10</sup>

Agnes Heller mengasumsikan politik identitas merupakan politik yang memfokuskan pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*) walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, biofeminisme, environmentalisme (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis.<sup>11</sup>

Menurut Castells di dalam buku Sri Astuti Buchari mengatakan bahwa politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.<sup>12</sup>

Politik identitas di Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai konstruksi yang kuat dari zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Persamaan identitas sebagai warga negara yang baru merdeka melahirkan rasa dan sikap nasionalisme

---

<sup>10</sup> Laode Machdani Afala, 2018, *Politik Identitas di Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 4.

<sup>11</sup> Ubed Abdillah, 2002, *Politik Identitas Etnis*, IndonesiaTera, Magelang, hlm. 22.

<sup>12</sup> Sri Astuti Buchari, 2014, *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 19

yang tinggi dari masyarakat untuk menunjukkan politik identitas dalam menyelenggarakan ketatanegaraan.<sup>13</sup>

Politik identitas yang secara pelan tetapi pasti menjelma sebagai dua kekuatan besar dalam perpolitikan yang didominasi oleh kaum nasionalis dan kaum Muslim, apabila dalam pengelolaan dua potensi besar tidak dengan kebijaksanaan akan menyebabkan kehancuran kestabilan negara. Menciptakan pertentangan antara kedua identitas tersebut dapat mengancam dan menghancurkan kestabilan negara apabila negara tidak memiliki political will dalam menangani sekaligus menjadi pihak tengah dalam menyikapi persoalan ini. Kepentingan masyarakat juga menjadi korban, sebab politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem demokratisasi yang mapan dalam sebuah negara.<sup>14</sup>

Keterkaitan atau interrelasi antara perubahan sosial dan identitas adalah sebagai sesuatu yang saling bertentangan, baik secara samar atau terang-terangan diantara masyarakat. Pengaktualisasikan penerapan identitas pada seseorang dapat saja mencerminkan atau mewakili dirinya sendiri maupun kelompok dalam kontek etnitas dapat terbentuk suatu identitas seperti Jawa, Tionghoa, Madura, Bali, dan sebagainya, dalam lingkup keagamaan seperti Islam, Budha, Kristen, Konghucu, dan Katolik. Identitas dalam suatu individu dapat saja secara langsung mewakili kelompok baik itu etnitas maupun agama dan nasionalitas.

Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia merupakan praktik pelaksanaan demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi politik identitas etnis dan agama. Orientasi politik identitas ini dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta dilihat dari keikutsertaan partai-partai

---

<sup>13</sup> Muhammad Sirajudin Fikri and Nico Oktario Adytyas, 2018, *Politik Identitas Dan Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal)*, Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, Vol. XVIII No. 2, 2018, XVIII. hlm. 2.

<sup>14</sup> Endang Sari, 2016, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Kritis, Jurnal Ilmusosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, vol 2.2, hlm. 145.

politik yang mengikuti pemilu atau Pilkada sebelumnya. Proses demokrasi dalam lingkup Pilkada sering melibatkan peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang berbeda yang ikut menyumbang perpecahan dari ragam identitas agama dan etnis sering kali dijadikan alat politik.<sup>15</sup>

Politik identitas akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan sarana politik. Menurut Ahmad Syafii Maarif,<sup>16</sup> bahwa politik identitas lebih terkait dengan etnisitas atau identitas etnis, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Politik identitas mengancam sikap nasionalisme dan pluralisme yakni sebuah realitas kegamangan yang dialami bangsa Indonesia terkait menguatnya politik identitas. Terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme.

Agama juga seringkali bersifat absolut, benar tentang diri sendiri, arogan, dogmatis, dan tidak mau menunggu kompromi. Agama tidak bersikap toleran terhadap agama lain dan perbedaan pendapat di dalam dirinya, dan mempunyai satu kecenderungan bagi adanya kekerasan dan juga sering mulai membentuk hubungan yang sangat jahat dengan rezim-rezim opresif yang tidak manusiawi, dan menggunakan nama tuhan untuk mengadili tindakan-tindakan jahat. Agama adalah mahamulia ketika berada dalam posisi terbaiknya tetapi paling jahat dan kejam ketika berada dalam posisi terburuknya.<sup>17</sup>

Politik identitas dikaitkan dengan agenda, aksi, aktivisme politik yang di dalamnya anggota kelompok berbasis identitas

---

<sup>15</sup> Arya Hadi Dharmawan, 2007, *Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif Dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan Dan Ekologi Politik*, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1.2, hlm. 40.

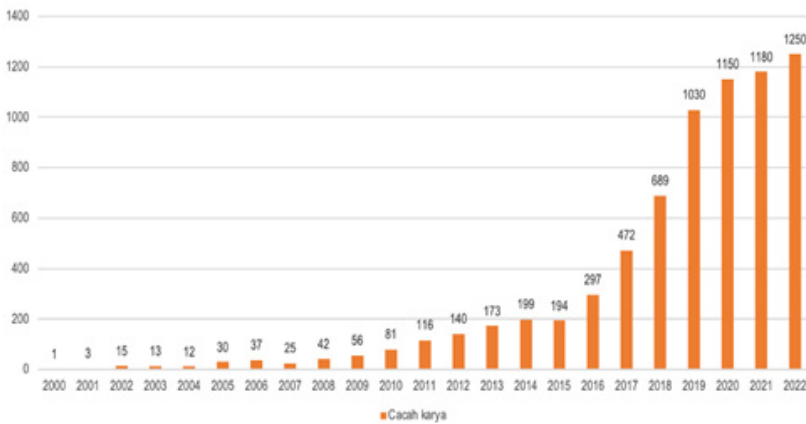
<sup>16</sup> Ahmad Syafii Maarif, 2010, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 20.

<sup>17</sup> Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Keragaman Budaya dan Teori Politik*, hlm.433.

mengorganisasi dan memobilisasi diri untuk melawan ketidakadilan yang dialami karena struktur, sistem, dan praktik yang hegemonik.<sup>18</sup> Pelacakan literatur menemukan, bahwa ketika lahir di 1970an di Amerika, politik identitas merupakan gerakan untuk melawan ketidakadilan.<sup>19</sup> Sebagai contohnya perjuangan perempuan kulit hitam di Amerika yang sangat itu menjadi warga kelas dua, di bawah penindasan kulit putih.<sup>20</sup>

Muhammad A.S. Hikam<sup>21</sup> dalam tulisannya yang berjudul “Islam, Demokrasi, dan Peremberdayaan *Civil Society*”. Temuan mengindikasikan perhatian intelektual Indonesia terhadap isu ini meningkat sejalan dengan waktu. Pada 2000, hanya satu karya yang menyinggung isu politik identitas, pada 2010 terdapat 81 karya, dan pada 2019 ditemukan 1.030 karya. karya yang menggunakan bahasa lain. Temuan ini paling tidak melacak sejak kapan isu politik identitas mulai mewarnai perhelatan politik di Indonesia, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1. Grafik Politik Identitas Mewarnai Perhelatan Politik di Indonesia**



<sup>18</sup> Miller, J. S., 2021, *Identity politics*, Dalam *Encyclopedia of Queer Studies in Education*, Brill, p. 294-298

<sup>19</sup> Maarif, A. S., 2010, *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.

<sup>20</sup> Garza, A., 2019, *Identity politics: friend or foe?* Othering & Belonging Institute, University of California, Berkeley. Tersedia daring: [identity-politics-friend-or-foe](https://identity-politics-friend-or-foe.org/).

<sup>21</sup> Muhammad A.S. Hikam, *ibid.*,

Berdasarkan grafik tersebut di atas, menunjukkan bahwa politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak. Sependapat dengan Hikam, jika ini terjadi, maka negara akan semakin mendapat legitimasi untuk melakukan intervensi atas nama keamanan dan ketertiban sosial. Negara menjadi semakin tidak netral atau bias terhadap kepentingan kelompok. Supaya hal ini tidak terjadi, maka kontestasi politik, pluralitas perlu mendapatkan tempat dan bukan menonjolkan identitas, melainkan program kerja dan gagasan, serta menjaga semangat inklusivisme.

Menurut Fukuyama<sup>22</sup> tidak ada yang salah dengan politik identitas, yang disebutnya sebagai kesukuan baru (*new tribalism*). Fukuyama segera mewanti-wanti, *pertama*, politik identitas akan menjadi bermasalah ketika diinterpretasikan atau ditegaskan dengan cara yang salah, yang kehadirannya tidak juga menghilangkan ketimpangan atau ketidakadilan. *Kedua*, politik identitas menjadi bermasalah ketika lingkup identitas disempitkan dan berpotensi mengabaikan kepentingan yang lebih besar. *Ketiga*, kesalahan dalam mengartikan politik identitas dapat menjadi ancaman terhadap iklim kebebasan berpendapat dan bahkan lebih jauh menggantikan diskursus rasional yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi.

Praktik politik identitas tidak justru melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kesetaraan, tetapi justru menghadirkan ketidakadilan dan ketimpangan baru. Politik identitas berbasis identitas tertentu merasa berhak mendominasi dan bahkan menghinakan kelompok dengan identitas lain. Penggunaan politik identitas, dapat menjadi pelajaran berharga,<sup>23</sup> Jika

---

<sup>22</sup> Fukuyama, 2018, *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.

<sup>23</sup> Chua, A., 2018, *How America's identity politics went from inclusion to division*. *The Guardian*. Tersedia daring: <https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-division>.

menjadi pendukung penggunaan politik identitas secara salah dalam kontestasi politik di Indonesia, tampaknya kita sudah kehilangan hak untuk mengkritisi apa yang terjadi di tempat lain, seperti di Amerika Serikat. Ini bukan siapa yang kita dukung, tetapi soal kepedulian terhadap potensi keterbelahan bangsa.

## **Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Presiden 2024 Yang Demokratis**

Pembahasan mengenai Politik identitas masih menjadi isu baru di Indonesia, meskipun pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah ada sejak lama, efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini. Apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para elite politik menggunakan kesamaan suku, agama, ras dan etnik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pemilih.

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial politik, ekonomi maupun budaya, menjadi terkendala dengan adanya sistem dominasi ketokohan ini. Sikap dan pandangan untuk memilih ataupun tidak memilih dalam proses politik lebih besar, dapat ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan bahkan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu.<sup>24</sup>

Keputusan untuk memilih ditentukan faktor seperti faktor sosiologis, psikologis, serta *rational choice* atau pilihan rasional.<sup>25</sup> Perilaku pemilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau

---

<sup>24</sup> H.Basuki Rachmat dan Esther, "Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015" Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, Vol.XLII No.2, tahun 2016, hlm.28-29.

<sup>25</sup> Burhanuddin Muhtadi, 2019, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 63

kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku pemilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

Pendekatan psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Trias determinan, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu atau utama. Pendekatan psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat.<sup>26</sup>

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol. Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional.<sup>27</sup>

Penilaian terhadap isu dan kandidat bukanlah menjadi faktor utama, terdapat faktor lain yang juga ikut mempengaruhi yakni adanya informasi terkait isu terhadap para calon atau kandidat yang selalu diterima para pemilih melalui media massa, serta media sosial yang diikutinya. Berita dan komentar-komentar yang dimuat di media massa, serta media sosial khususnya berita atau komentar-komentar negatif, seringkali

---

<sup>26</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso Dan Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2015, *Laporan Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Tingkat Kpu Kabupaten Bondowoso: Perilaku Pemilih*, KPU Bondowoso Dan Lembaga Penelitian Universitas Jember, Jember, hlm. 11.

<sup>27</sup> Haryanto, *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Vol.17, No.3, tahun 2014, hlm. 292.

mempengaruhi penilaian para pemilih terhadap kandidat, posisi kandidat dalam suatu isu, dan preferensi kandidat dalam suatu kebijakan tertentu. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat yang khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali yakni, kualitas, kompetensi dan integritas terhadap calon atau kandidat tersebut juga termasuk salah satu faktor dalam pendekatan model pilihan rasional perilaku pemilih.<sup>28</sup>

Saat ini masyarakat Indonesia semakin terkotak-kotak dan terbagi tidak hanya dalam kehidupan perpolitikannya, namun juga sosial dan budayanya. Hal ini jika dibiarkan terus menerus akan mengoyak stabilitas bangsa.<sup>29</sup> Perbedaan yang dimiliki sejatinya pernah menjadi kekuatan, saat ini malah menjadi senjata yang menghancurkan dari dalam bangsa kita sendiri. Solusinya hanya satu, dialog dengan siapapun yang memiliki pandangan berbeda dengan, maka akan membuka satu sudut pandang baru untuk memahami dalam bersikap dan memilih pendirian masing-masing.

Fenomena politik identitas dengan populisme agama akan menjadi ranjau bagi demokrasi negara ketika digunakan oleh pemimpin yang tidak cakap. Politik identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Hal ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilu maupun pemilihan.

Sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, penggunaan isu politik identitas mulai kerap digunakan dalam rangka mencari dukungan suara. Berita hoax dan ujaran kebencian berbau SARA yang ditunjukkan kepada salah satu pasangan calon atau calon

---

<sup>28</sup> Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Bondowoso Dan Lembaga Penelitian Universitas Jember, *ibid.*, hlm.18, dan 21.

<sup>29</sup> Muhammad Habibi, 2018, Analisis Politik Identitas di Indonesia. [10.31227/osf.io/pey72](https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72) Shared:

perseorangan, dengan harapan lawan politik kehilangan dukungan masyarakat. Berdasarkan isu-isu tersebut sampai ke calon pemilih yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan mudah terpengaruh, besar kemungkinan para calon dari kaum minoritas ini akan kehilangan apresiasi rakyat. Jejak karier dan prestasi calon tersebut cukup mempunyai untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat.

Politik identitas berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengingat pluralisme masyarakatnya. Apabila populisme dalam politik identitas semakin menguat, tidak akan ada lagi keadilan sosial, persamaan hak untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan kebebasan untuk orang lain maupun diri sendiri.

Politik identitas berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik juga akan menciptakan jurang pemisah antar kelompok umat beragama di Indonesia. Kuatnya tekanan dari kelompok agama radikal di Indonesia secara tidak langsung akan memberikan dampak buruk bagi pemeluk agama yang lain. Pemeluk agama minoritas akan merasa didiskriminasi, sehingga akan memunculkan perpecahan antar umat beragama.

Menurut Penulis belajar dari pengalaman pemilu serentak 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu itu akan kembali muncul dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Peristiwa yang lalu memiliki kesempatan besar untuk terus digaungkan oleh kelompok radikal demi keuntungan pribadi. Dalam hal ini oleh golongan-golongan yang pada dasarnya menginginkan perpecahan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas di Indonesia.

Praktik politik identitas akan menjadi salah satu hal yang penting bagi Indonesia menjelang pemilu 2024 mendatang. Politik identitas berhubungan erat dengan kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi. Jika masalah SARA merupakan hal yang sensitif untuk dijadikan alat

kampanye. Sebagai negara yang multikultural serta demokratis, sudah sepantasnya semua masyarakat memiliki kesetaraan hak dalam pemilu. Politik identitas meskipun itu basisnya perbedaan, namun menekankan perbedaan tidak selalu berkonotasi negatif apalagi jika nalar publik dapat membedakan mana yang esensial dan mana yang tidak.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sbagai berikut :

- a. Politik identitas seringkali disalahpahami sebagai bagian dari politik praktis yang merupakan politik kebangsaan. Politik identitas terkait dengan etnisitas atau identitas etnis, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial akan dengan mudah menggantikan politik kewarganegaaan, dan wawasan kebangsaan menjadi terdesak. Negara menjadi semakin tidak netral atau bias terhadap kepentingan kelompok, supaya hal ini tidak terjadi, maka kontestasi politik, pluralitas perlu mendapatkan tempat dan bukan menonjolkan identitas, melainkan program kerja dan gagasan, serta menjaga semangat inklusivisme.
- b. Perilaku pemilih selalu berusaha menjadi pemilih yang cerdas dengan mengendepankan sikap kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi yang sensitif untuk dijadikan alat kampanye. Politik identitas berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengingat pluralisme masyarakatnya. Jika populisme dalam politik identitas semakin menguat, tidak akan ada lagi keadilan sosial, persamaan hak untuk seluruh

rakyat Indonesia, bahkan kebebasan untuk orang lain maupun diri sendiri. Praktik politik identitas akan menjadi salah satu hal yang penting bagi Indonesia menjelang pemilu 2024 mendatang, mengingat politik identitas berhubungan erat dengan kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi.

## 2. Saran

Politik identitas terjadi karena alasan aktor politik saja, jika pemilih juga berperan aktif dalam terjadinya kegiatan tersebut. Pada dasarnya politik identitas itu basisnya perbedaan, namun menekankan perbedaan tidak selalu berkonotasi negatif apalagi jika nalar publik dapat membedakan mana yang esensial dan mana yang tidak.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Ahmad Syafii Maarif, 2010, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- Burhanuddin Muhtadi, 2019, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral*, Intrans Publishing, Malang.
- Emzir, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fukuyama, 2018, *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso Dan Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2015, *Laporan Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Tingkat Kpu Kabupaten Bondowoso: Perilaku Pemilih*, KPU Bondowoso Dan Lembaga Penelitian Universitas Jember, Jember.

- Laode Machdani Afala, 2018, *Politik Identitas di Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Lexy J. Moeloeng, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Maarif, A. S., 2010, *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
- Miller, J. S., 2021, *Identity politics*, Dalam *Encyclopedia of Queer Studies in Education*, Brill.
- Sri Astuti Buchari, 2014, *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ubed Abdillah, 2002, *Politik Identitas Etnis*, Indonesia Tera, Magelang.
- Jurnal :**
- Arya Hadi Dharmawan, 2007, *Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif Dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan Dan Ekologi Politik*, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1.2.
- Endang Sari, 2016, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Kritis, Jurnal Ilmusosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, vol 2.2.
- H.Basuki Rachmat dan Esther, “*Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015*” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, Vol. XLII No.2, tahun 2016.
- Haryanto, *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Vol.17, No.3, tahun 2014.
- Lestari, Y. S., 2018, *Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama*. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19 - 30. Retrieved from <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>.

Muhammad Habibi, 2018, Analisis Politik Identitas di Indonesia. 10.31227/osf.io/pey72 Shared.

Muhammad Sirajudin Fikri and Nico Oktario Adytyas, 2018, *Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal)*, Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, Vol. XVIII No. 2, 2018, XVIII.

**Internet :**

Chua, A., 2018, *How America's identity politics went from inclusion to division. The Guardian*. Tersedia daring: <https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-division>.

Fatihah Wardah, "Hasil Ijtima' Ulama II pastikan dukungan bagi Prabowo-Sandiaga" (<https://www.voaindonesia.com>), diakses pada tanggal 2 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

Garza, A., 2019, *Identity politics: friend or foe? Othering & Belonging Institute, University of California, Berkeley*. Tersedia daring: [identity-politics-friend-or-foe](https://www.otheringandbelonging.org/identity-politics-friend-or-foe).

